SKRIPSI

STRATEGI PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA TAHUN 2019

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi ilmu pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2021

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

STRATEGI PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA TAHUN 2019

Oleh:

AHMAD SYAFAR ZINUL ASRAR

Untuk memenuhi ujian sidang skripsi Pada Tanggal 8 Februari 2021

> Menyetujui Pembimbing

Pembimbing 1

Pembimbing II

Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP. M.Si

NIDN.0825038303

estanata, S.IP. M.IP

NIDN.0827118801

Mengetahui, Ketua Program Studi ilmu Pemerintahan

> Avatullah Hadi, 8.IP., M.IP NIDN.0816057902

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

STRATEGI PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA TAHUN 2019

Oleh:

AHMAD SYAFAR ZINUL ASRAR

Telah di Pertahankan Didepan Penguji Pada Tanggal 8 Februari 2021 Di Nyatakan Telah Memenuhi Persyaratan

Tim Penguji,

1. Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si NIDN.0825038303

2. Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP

NIDN.0827118801

3. Drs. Mintasrihardi, M.H.

NIDN.0830016101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si

NIDN.0806066801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Syafar Zinul Asrar

Nim : 216130005

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar skripsi disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Mataram, 15 Oktober 2021 Saya yang menyatakan

Ahmad Syafar Zinul Asrar 216130005



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website: http://www.lib.ummat.ac.id E-mail: upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiy bawah ini: Nama Ahmad Syafar Zinul NIM Albi 300 05 Tempat/Tgl Lahir: Pasabou. 02 -11-199 Program Studi Fakultas firipol No. Hp/Email 082 340 592 952/	Asrar
Tempat/Tgl Lahir: Kasabou . 02 - 11 199	
Program Studi : [IM9 Contermedian	
Fakultas : FCF-FOI	ahmads yafar zinul @ gmail .com
No. Hp/Email :	the day for all the second
Judul Penelitian : -	
Strategi Perdamping Lokal De Pembangunan Desa di Kecamatan	sa Dalam Percepatan Sape Kabupaten Bina tehun 2019
Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya oran	ig lain. 55 % 548, 47 %
Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau seba tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia n berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.	
Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesuruntuk dipergunakan sebagai mana mestinya.	ngguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan
Dibuat di : Mataram	
Pada tanggal: 12 Maraf 2021	
	Mengetahui
Penulis	Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT
MPEL SAHF913618810	
OO SURUPIAN 2	
Ahmod Syafar Zinui Asrar	Islandar, S.Sos., M.A.
NIM 2161 300 05	MIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

JI. K.H.A. Dahlan No. Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website: http://www.lib.ummat.ac.id E-mail: upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama AHMAD SYAFAR ZIMUL ASRAR NIM ZIGI 30005 PASABOU, 02-11-1996 IIMU PEMERIMTAHAM Fakultas No. Hp/Email S82 340 892 952 / ahmad syaFar Zirul @ gmoil. Com Jenis Penelitian: Skripsi SKTI
Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai penulik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul: STRATEGO PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PEREEPATAM PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN SAPE KABUPATEH BIMA TAHUH 2019
Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dibuat di : Mataram Pada tanggal: 12 Maraf 2021
Penulis Mengetahui, Kepala LIPT. Perpustakaan UMMAT Mengetahui, Kepala LIPT. Perpustakaan UMMAT Mengetahui, Kepala LIPT. Perpustakaan UMMAT Mingraphian Syafar 21nol Asrac Mingraphian Syafar 21nol Asrac NIDN. 0802048904

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



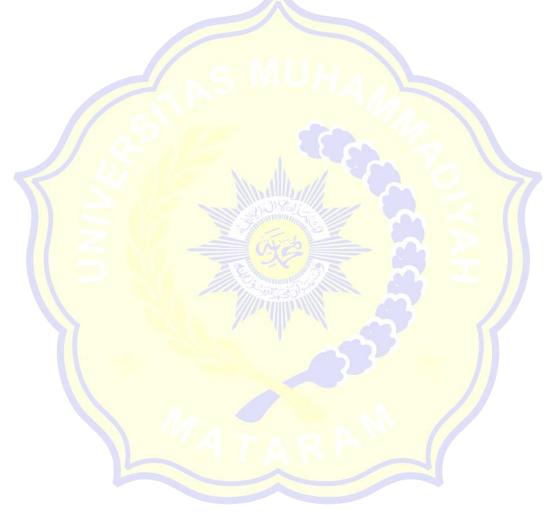
Ahmad Syafar Zinul Asrar, Dilahirkan di Kabupaten Bima tepatnya di Desa Rasabou Kecamatan Sape pada hari tanggal 02 November 1996. Anak keempat dari enam bersaudara pasangan dari Maaruf H. Ahmad Rosmeri. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 06 Sape di Kecamatan Sape Kabupaten Bima pada tahun pada tahun 2009. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 01 Sape Kecamatan Sape dan tamat pada tahun 2012 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Sape pada tahun 2012 dan seslesai pada tahun 2015. Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan

pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik pada Program Studi Ilmu Pemerintahan. Peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2021.

Demikian daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia, menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.

MOTTO

Genggamlah dunia sebelum dunia menggenggammu



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk ayah dan ibu yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk teman dan sahabat yang selalu ada disisi saya. Saya bahkan tidak bisa menjelaskan betapa bersyukurnya saya memiliki kalian dalam hidup saya.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan tanggung jawab untuk menyelesaikan skripsi saya yang berjudul "Strategi Pendamping Lokal Desa dalam Percepatan Pembangunan Desa Di Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019". Penyusunan Skrispi ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Terselesainya penulisan skripsi ini tidak lain berkat dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, tanpa adanya dukungan dan motivasi dari mereka, mungkin penulis tidak bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan serta penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terutama kepada:

- Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- 4. Bapak Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP.,M.Si selaku pembimbing utama penulisan skrispi ini.

- 5. Bapak Yudhi Lestananta, S.IP.,M.IP selaku pembimbing pendamping dalam penulisan skripsi ini.
- Kedua Orang tua saya, ayah Maaruf H. Ahmad, S.Adm dan ibu saya Rosmeri,yang dengan penuh kasih memberi semangat, doa dan dukungan yang tak henti-hentinya.
- 7. Saudara saya Yuliarti, S.Pd, Ummuel Kulsum, Ikhlasul Amalia, Rizalul Fikri, dan Lubna Nur Azizah.
- 8. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2016.
- 9. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Apabila ada kesalahan dalam penulisan kata-katanya yang kurang dalam penulisan skripsi ini penulis mohon dimaafkan dan kritik serta saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca untuk menambah pengetahuan dan referensi.

Mataram, 02 Februari 2021

Peneliti

AHMAD SYAFAR ZINUL ASRAR NIM. 216130005

STRATEGI PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA TAHUN 2019

Oleh:

AHMAD SYAFAR ZINUL ASRAR

Pembimbing I : Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP.,M.Si

Pembimbing II : Yudhi Lestanata, S.IP.,M.IP

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Strategi Pendamping Lokal Desa dalam Percepatan Pembangunan Desa Di Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019" dengan tujuan untuk mengetahui strategi Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam percepatan pembangunan Desa di Kecamatan Sape Kabupaten Bima tahun 2019 dan faktor penghambat strategi Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam percepatan pembangunan Desa di Kecamatan Sape Kabupaten Bima tahun 2019.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif. Dengan tekhnik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Tekhnik Penentuan narasumber dalam penelitian ini menggunakan tekhnik *purposive sampling* dengan jumlah informan dan narasumber sebanyak 4 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam percepatan pembangunan Desa di Kecamatan Sape Kabupaten Bima tahun 2019 masih belum maksimal, karena disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah Desa dan pemerintah Kabupaten, sehingga mengakibatkan berbagai program yang sudah direncanakan terlambat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan program prioritas pemerintah Kabupaten.

Kata Kunci: Strategi, Pendamping Lokal Desa (PLD) dan Percepatan Pembangunan

STRATEGIES FOR VILLAGE LOCAL ASSISTANCE IN ACCELERATING VILLAGE DEVELOPMENT OF SAPE, BIMA DISTRICT, IN 2019

By:

AHMAD SYAFAR ZINUL ASRAR

First Advisor : Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si

Second Supervisor: Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP

ABSTRACT

The aim of this study, "Village Local Assistance Strategies in the Acceleration of Village Development in Sape District, Bima Regency in 2019," was to learn about the Village Local Assistance (PLD) strategy in accelerating Village development in Sape District, Bima Regency in 2019, as well as the inhibiting factors for the Village Local Assistance (PLD) strategy in accelerating Village development in Sape District, Bima Regency in 2019.

The descriptive-qualitative approach was used in this study. Interviews, observation, and recording are some of the data collection methods used. Purposive sampling was used to determine the sources in this report, with a total number of informants and sources as many as 4 people.

The findings show that the Village Local Assistance (PLD) strategy for accelerating village development in Sape, Bima District in 2019 is still not optimal, due to a lack of coordination between the Village government and the Regency government, resulting in various programs that were planned to be implemented late due to their inadequacy.

Keywords: Strategy, Village Local Assistance (PLD) and Development Acceleration

MENGESAHKAN SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA MATARAM

KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMAADIYAH MATARAM

NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi
HALAMAN PERSETUJUANii
HALAMAN PENGESAHANiii
PERNYATAAN KEASLIANiv
BEBAS PLAGIARISMEv
PUBLIKASI KARYA ILMIAHvi
RIWAYAT HIDUPvii
MOTTOviii
PERSEMBAHANix
KATA PENGANTARx
ABSTRAKxii
ABSTRACT xiii
DAFTAR ISIxiv
DAFTAR TABELxvi
DAFTAR GAMBARxvii
BAB I PENDAHULUAN1
A. Latar Belakang1
B. Rumusan Masalah7
C. Tujuan Penelitian7
D. Manfaat Penelitian8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA10
A. Penelitian Terdahulu10
B. Kajian Teori19
1. Konsep Desa
2. Konsep Strategi20
3. Konsep Pendamping Lokal Desa29

	4. Konsep Pembangunan	35
C	. Kerangka Berpikir	43
	Definisi Konseptual dan Definisi Operasional	44
	2. Defenisi Operasional	47
BAB	III METODE PENELITIAN	49
A	. Jenis Penelitian	49
В	. Lokasi	49
C	Sumber Data	50
D	. Tehnik Pengumpulan Data	51
\mathbf{E}	Tehnik Pengambilan Narasumber	53
F.	Tehnik Analis <mark>is Data</mark>	53
BAB	IV PEMBAHASAN	56
A	. Deskriptif Lokasi Penelitian	56
	1. Profil Kecamatan Sape	56
	2. Pendamping Lokal Desa	
В	. Aspek Strategi Pembangunan Desa	62
	1. Formulasi dan Sasaran Jangka Panjang	64
	2. Pemilihan Tindakan	72
	3. Keterbatasan Sumber Daya	80
C	. Faktor Penghambat Strategi Pendamping Lokal Desa dalam Percepatan	
	Pembangunan Desa	81
	1. Pembangunan Aspek Fisik	81
	2. Pembangunan Aspek Non-Fisik	84
	3. Pembangunan Aspek Ekonomi	88
	4. Pembangunan Aspek Sosial	88
DAD	V PENUTUP	00
DAB	Y FENUTUP	9 U
A	. Kesimpula <mark>n</mark>	90
	Saran	

DAFTAR PUSTAKA

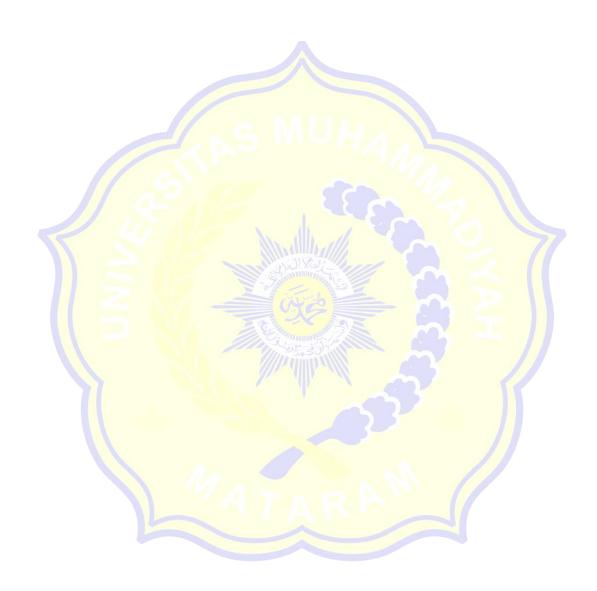
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 2.2 Kerangka Berpikir	43
Tabel 3.1 Daftar Narasumber	53
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Sape Tahun 2019	58
Tabel 4.2 Tugas Pendamping Lokal Desa	60
Tabel 4.3 Luas Tanah Sawah dengan Jenis Irigasi Dirinci Perdesa	
Tahun 2018	66
Tabel 4.4 Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Ririnci	
Menurut Komoditas Tahun 2018	67
Tabel 4.5 Jumlah Ternak Dirinci Perdesa Tahun 2019	68
Tabel 4.6 Jumlah Unggas Dirinci Perdesa Tahun 2019	69
Tabel 4.7 Rencana Kegiatan Pendamping Lokal Desa Kec. Sape Tahun 2019	74
Tabel 4.8 Realisasi Kegiatan/Kunjungan Lapangan Pendamping Lokal Desa	
Kec. Sape	
4.9 Daftar Nama Pendamping Desa Kec. Sape	83
4.10 Laporan Bulanan Pendamping Lokal Desa Tahun 2019	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Model Interaktif Miles dan Huberman	54
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kecamatan Sape	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat tercipta landasan yang kuat. Dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada masyarakat yang adil, sejahtera dan makmur. (Solekhan, 2014)

Upaya yang dilakukan untuk mendukung kelancaran implementasi percepatan pembangunan Desa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu pemerintah melakukan pendampingan dengan dibantu oleh pendamping profesional yang berpengalaman dibidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa. Tenaga pendamping tersebut ditempatkan di Kabupaten, Kecamatan dan di Desa.

Kehadiran Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan sekaligus tantangan baru bagi Desa khususnya di Kecamatan Sape. Dalam undang-undang tersebut pemberdayaan menjadi sebuah misi, tujuan, asas dan agenda kebijakan yang secara prinsip diwujudkan dengan mengakui dan menetapkan kewenangan Desa, sementara pemerintah berkewajiban menjamin agar Desa mampu melaksanakan upaya pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan.

Pembangunan Desa tidak terlepas dari konteks manajemen maupun strategi pembangunan daerah baik di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten maupun tingkat Provinsi karena kedudukan Desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, akses jalan, dan politik) harus melihat keterkaitan antar Desa, Desa dalam Kecamatan, antar Kecamatan dan Kabupaten dan antar Kabupaten dan Provinsi. (Wahjudin, 2015).

Seperti yang tertuang dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah, pemerintahan daerah Provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten atau Kota bertugas untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa. Yang artinya Desa haruslah mendapatkan bimbingan, pembinaan, serta pengawasan di dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanannya terhadap masyarakat sekaligus memberdayakan masyarakat itu sendiri.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9. Pembangunan Desa ini tidak hanya melului membicarakan tentang pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor sumber daya manusia adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan Desa, khususnya pendamping Desa. Yang dimana pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Mewujudkan tujuan pencapaian pembangunan Desa agar masyarakat dapat merasakan kesejahteraan serta tidak ada laginya kecemburuan sosial antara pembangunan disetiap Desa maupun wilayah, pemerintah telah menyiapkan berbagai perangkat untuk mendukung tujuan pembangunan pedesaan. (Aprillia Theresia, 2015).

Undang-Undang Desa Pasal 128 sampai dengan Pasal 131.

Pendampingan lokal Desa pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pendamping Desa, bahwa pendamping Desa bertujuan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.

Konsepsi pendampingan Desa ini, lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Desa Pasal 128 sampai dengan Pasal 131 dengan sub paragraf Pendampingan Masyarakat Desa. Lebih rinci pada pasal 2 dalam tujuan pendampingan Desa dalam peraturan menteri ini meliputi:

- Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan
 Desa dan pembangunan Desa;
- 2. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan Desa yang partisipatif;
- 3. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antar sektor; dan
- 4. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

Selain itu, pendamping Desabertugas mendampingi Desa, meliputi:

- Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- 3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- 4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
- Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
- 6. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
- Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Memperhatikan struktur pemerintahan Desa di Kecamatan Sape, terlihat bahwa masing-masing Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh seorang Sekretaris Desa dan rata-rata untuk masing-masing Desa terdapat 6 orang pamong Desa yang lain. Tingkat pendidikan kepala Desa di Kecamatan Sape pada umumnya adalah SMA dan Perguruan Tinggi. (BPS, Kabupaten Bima Dalam Angka 2018).

Berdasarkan hasil pra-riset peneliti dengan bapak Abdul Haris, ST Pendaping Desa Pemberdayaan (PDP) Kecamatan Sape Kabupaten Bima, bahwa di Kabupaten Bima sendiri terdapat 6 tenaga ahli yang bertanggung jawab di 18 kecamatan. Pendamping Desa di Kecamatan Sape ada 9 Pendamping Desa, 2 (dua) Pendamping Desa Pemberdayaan yang berkedudukan di Kecamatan, 1 (satu) Pendamping Desa Teknik Infrastruktur yang berkedudukan di Kecamatan dan 6 Pendamping Lokal Desa yang berkedudukan di Desa. di Kecamatan Sape terdapat 18 (Delapan belas) Desa dan 1 Pendamping Lokal Desa mendampingi 3 Desa.

Namun dalam pelaksanaanya terdapat permasalahan dalam implementasi pendamping Desa. Kendala yang terjadi karena belum maksimalnya pendamping yang dilakukan oleh pendamping lokal Desa di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, yaitu:

 Masih ada Desa yang belum menyelesaikan laporan pertanggung jawaban dikarenakan berbagai macam permasalahan

- Ada beberapa Desayang belum meyelesaikan Pelaksanaan Kegiatan mencapai 100%.
- 3. Terlambatnya Penetapan pagu indikatif dana Desa sehingga memperlambat Perencanaan dan penetapan skala prioritas kegiatan yang direncanakan.
- 4. Terlambatnya pembahasan, penetapan dan sosialisasi peraturan Bupati.
- 5. Dasar pelaksanaan pendampingan dana Desa, kami sebagai pendamping Desa mengharapkan regulasi yang memberikan kewenangan untukmemberikan kebijakan untuk menjadi bagian dari penentu Proses Pembangunan.
- 6. Usulan kegiatan dari Desa belum sepenuhnya menyentuh apa yang menjadi cita-cita Pemerintah bahwa Desa membangun Desa yang mandiri baik secara ekonomi maupun Kemampuan dalam mengatur dirinya sendiri.
- 7. Aparat Desa masih kurang Paham tentang Penatausahan dana kegiatan.

Melihat fenomena dan permasalahan mengenai Pendamping Lokal Desa di atas, peneliti menilai penting untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya Strategi Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Ukuran mengenai Strategi dalam percepatan pembanguna Desa tidak hanya berdasarkan kedisiplinan tetapi karena banyak faktor. Oleh sebab itu, jika di dasarkan pada permasalahan yang diuraiakan peneliti tertarik mengangkat judul "Strategi Pendamping Lokal Desa Dalam Percepatan Pembangunan Desa di Kecamata Sape Kabupaten Bima Tahun 2019".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana Strategi Pendamping Lokal Desa (PLD) Dalam Percepatan Pembangunan Desa di Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019?
- 2. Apa Saja Faktor Penghambat Strategi Pendamping Lokal Desa (PLD)
 Dalam Percepatan Pembangunan Desa di Kecamatan Sape Kabupaten
 Bima Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

 Bagaimana strategi Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam percepatan pembangunan Desa di Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019. Apa saja faktor Penghambat Strategi Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam percepatan pembangunan Desa di Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang dipaparkan oleh peneliti, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis menunjukkan bahwa hasil penelitian bermanfaat untuk memperkaya pemikiran atau memperkaya konsep ilmiah dan teori ilmiah sesuai bidang keilmuan yang diteliti...

Jadi manfaat teoritis penelitian ini adalah hasil penelitiannya dapat dijadikan sebagai bahan literature yang memperkaya khasanah ilmu pengetahuan maupun kajian pustaka serta penelitian lebih lanjut yang berkaitn dengan bidang Ilmu Pemerintahan.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis adalah manfaat secara langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan oleh masyarakat. Jadi, manfaat praktis dalam penelitian ini yang dimaksud antara lain:

Penelitian ini dapat menjadi bahan atau wawasan, dan memberikan sumbangsi pemikiran serta memberikan inspirasi terkait Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Peningkatan Pembangunan Desa di Kecamata Sape Kabupaten Bima.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada saat penulisan karya ilmiah ini, penulis memeriksa dan menggali informasi yang diberikan oleh peneliti sebelumnya sebagai bahan perbandingan untuk memahami kelebihan dan kekurangan yang ada. Selain itu peneliti juga menggali informasi dari beberapa buku dan makalah serta makalah untuk memperoleh teori-teori yang berkaitan dengan judul buku yang dijadikan dasar teori-teori ilmiah. Berikut referensi yang digunakan oleh penulis.

Pada penelitian pertama yang dilakukan oleh Maria Christina Mahasiawa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 2017 Universitas Lampung, yang berjudul "Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Desa Di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah". Karya Tulis Ilmiah Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kinerja Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah serta faktor yang mempengaruhi kinerja Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif kualitatif, jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui metode wawancara, observasi dan Kemudian pencatatan. menganalisa, mempresentasikan dan memverifikasinya menjadi penelitian ilmiah. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa kinerja pendampingan yang diberikan oleh koordinator desa setempat belum optimal. Dari segi indikator prestasi kerja (prestasi), koordinator desa setempat tidak menunjukkan hasil yang positif karena pelaksanaan pekerjaan pembinaan yang tidak tepat. Keterampilan pendamping desa setempat masih sangat rendah dan mereka belum memiliki pengalaman kerja.

Pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Siti Romza Mahasiswa Jurusan Filsafat Politik Islam Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2018 Surabaya, yang berjudul "Optimalisasi Fungsi Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan Desa Sukorejo Dan Karanganom, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan" Penelitian yang berjudul ini memfokuskan kajiannya pada Tiga permasalahan. Pertama, tentang Bagaimana Mekanisme kerja pendamping Lokal Desa dalam pembangunan Desa Sukorejo dan Desa Karanganom, kedua yaitu bagaimana tantangan yang dihadapi pendamping lokal Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sukorejo dan Desa Karanganom, dan yang terakhir yaitu Manfaat adanya pendamping lokal Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Sukorejo dan Desa Karanganom Penelitian ini menekankan pada observasi langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penggalian data lewat wawancara serta didukung sumber refrensi/literatur terkait untuk menganalisis temuan data. Metode yang digunakan ialah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme kerja

Pendamping Lokal Desa dalam pembangunan di Desa Sukorejo dan Karanganom meliputi beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan/evaluasi. Terdapat perbedaan dari dua Desa tersebut dilihat dari peran masyarakat mengenai pembangunan seperti kurangnya aspirasi dalam forum rembug Desa dan Musrenbangdes. Kesadaran masyarakat akan pembangunan perlu ditingkatkan karena masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan keikutsertaan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam pemerintahan Desa juga ditemukan kecurangan dalam pengelolaan dana Desa, sehingga transparansi pemerintah Desa sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan pembangunan.

Pada penelitian ketiga yang dilakukan oleh Komaruddin Mahasiswa Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan 2018 Lampung, yang berjudul "Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Msyarakat (Studi Di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)" Fokus kajian adalah implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui peran Pendamping Desa. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Pendamping Desa dalam pemberdayaan di Pekon Paku menghasilkan beberapa perubahan. Berdasarkan temuan-temuan peneliti dilapangan menunjukkan adanya kemajuan dalam hal peningkatan kapasitas pemerintahan Pekon seperti penggunaan teknologi tepat guna, kemajuan dalam hal administrasi dan pelayaan umum, namun masih

minim dalam pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat, seperti pembinaan terhadap para nelayan, kelompok tani dan peternak kambing yang ada di Pekon Paku. Setelah peneliti menganalisa semua data yang didapat menunjukkan hasil bahwa pemberdayan yang dilaksanakan di Pekon Paku kurang maksimal dikarenakan beberapa faktor penghambat yaitu, pendamping bukan asli warga Pekon Paku, terlalu luas Desa yang di dampingi oleh Pendamping Lokal Desa yang seharusnya hanya 4 Desa menjadi 10 Desa, jarak tempuh dari tempat tinggal pendamping menuju Desadampingan terhitung jauh, sehingga pendampingan yang dilakukan kurang efektif dan intensitas pendampingan sangat rendah.

Penelitian selanjudnya yang berhubungan dengan pembangunan Desa, pernah dilakukan oleh *Rezky Susanti* (2015) dengan judul "Efektifitas pendampingan Desa dan pertisipasimasyarakat dalam pembangunan infrastruktur perdesaan di Desa sekodi Kecamatan Bengalis kabupaten bengkalis". Hasil dari penelitian ini tentang pendampingan Desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infastruktur perdesaan di Desa sekodi ini dirasa kurang efektif, hal ini karena pengetahuan masyarakat yang masih kurag tahu tentang keberadaan pendamping Desa dan partisipasi masyarakat yang kurang aktif.

Penelitian yang juga memiliki kedekatan tema dengan penelitian skripsi ini pernah dilakukan oleh *Perestroika Naek Pakkat*dengan skripsi yang berjudul "Peran Tenaga Pendamping Desa MenurutUndang-undang No 6 Tahun 2016 tentang Desa Dengan Upaya Optimalisas Pembangunan

Desa"Skripsi Fakultas Hukum UNPAS" penelitian ini berfokus kepada Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam perspektif Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana peran pendamping Desa dalam mengoptimalisasikan pembangunan Desa, serta rekrutmen tenaga pendamping Desa, dan mengkaji pada hambatan dan upaya apa yang dilakukan pendamping Desa dalam mengoptimalisasikan pembangunan Desaberdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi	Critical
110	1 cheffti	Penelitian	Hasii i chentian	Penelitian	Point
1	Maria	Kinerja	Hasil Penelitian:	Relevansi	Dari hasil
	Christina	Pendampi	Kinerja	penelitian ini	penelitian
	(2017)	ng Lokal	pendampingan	dengan	penulis
		Desa	yang dilakukan	penelitian	menunjuk
		Dalam	oleh Pendamping	penulis adalah	an bahwa
		Peningkat	Lokal Desa	sama-sama	kinerja
		an	belum maksimal.	meneliti	pendampi
		Pembangu	Pada indikator	kenerja	ngan yang
		nan Desa	prestasi kerja	maupun	dilakukan
		Di	(achievement)	strategi dalam	oleh
		Kecamata	Pendamping	pembangunan	Pendampi
		n Kalirejo	Lokal Desa	Desa.	ng Lokal
		Kabupaten	belum	4//	Desa
		Lampung	memperlihatkan		belum
		Tengah	hasil yang positif,		maksimal maksimal
			karena		
			pelaksanaan		
			pendampingan		
		1//	tidak		
			dilaksanakan		
			deng <mark>an baik.</mark>		
			Keahlian (skill)		
			dari Pendamping		
			Lokal Desa masih		
			sangat rendah dan	~ 7	11
			tidak memiliki		
			pengalaman		
2	Citi	Ontine	kerja.	Dalarias :	Double!1
2	Siti Romzah	Optimalisa	Hasil penelitian	Relevansi	Dari hasil
	(2018)	si Fungsi	ini menunjukkan bahwa	penelitian ini	penelitian
	(2016)	Pendampi ng Desa	mekanisme kerja	dengan penelitian	ini menunjuk
		dalam	Pendamping	penulis adalah	menunjuk an
		Pembangu	Lokal Desa	lebih fokus	Kesadaran
		nan Desa	dalam	pada	masyaraka
		Sukorejo	pembangunan di	optimalisasi	t akan
		dan Desa	Desa Sukorejo	fungsi	pembangu
		Karangano	dan Karanganom	pendamping	nan perlu
		m di	meliputi beberapa	lokal Desa	ditingkatk
		Kecamata	tahap yaitu tahap	dalam	an karena
		n	perencanaan,	pembangunan	masyaraka
			l =		_
		Karangbin	pelaksanaan, dan	Desa.	t lebih

		angun Kabupaten Lamongan	pemantauan/eval uasi. Terdapat perbedaan dari dua Desa tersebut dilihat dari peran masyarakat mengenai pembangunan seperti kurangnya aspirasi dalam forum rembug Desa dan Musrenbangdes.		mementin gkan kepentinga n pribadi dibanding kan keikutserta an dalam pelaksanaa n pembangu nan. Dalam pemerinta han Desa juga ditemukan kecuranga n dalam pengelolaa n dana Desa, sehingga transparan si pemerinta h Desa sangat dibutuhka n untuk memaksim alkan pembangu
		19/			nan.
3	Komarudd	Peran	Hasil Penelitian:	Relevansi	Pemberda
	in (2010)	Pendampi	menjukan bahwa	penelietian	yan yang
	(2018)	ng Desa	pemberdayan	penullis	dilaksanak
		Dalam Pemberda	yang dilaksanakan di	dengan	an di Pekon
			Pekon Paku	penelitian ini adalah sama-	Pekon Paku
		yan Masyarak	kurang maksimal	sama	kurang
		at (Studi	dikarenakan	mengfokuskan	maksimal
		Di Pekon	beberapa faktor	peran/strategi	dikarenaka
		Paku	penghambat	pendamping	n beberapa
		Kecamata	yaitu,	Desa, namun	faktor

		n	pendamping	adapun	penghamb
		Kelumbay	bukan asli warga	perbedaannya	at.
		an	Pekon Paku,	adalah penulis	
		Kabupate	terlalu luas	sekarang lebih	
		n	Desayang di	memerhatikan	
		Tanggam	dampingi oleh	percepatan	
		us)".	Pendamping	pembangunan	
		us).	Lokal Desa yang	Desa bukan	
			seharusnya hanya	pemberdayaan	
			4 Desa menjadi	masyarakat.	
			10 Desa, jarak	masyarakat.	
			tempuh dari		
			tempat tinggal		
			1 00		
			pendamping		
			menuju Desa		
			dampingan		
			terhitung jauh,		
			sehingga		
			pendampingan		
1			yang dilakukan		
			kurang efektif		
			dan intensitas		
			pendampingan		
	D 1	EC L. C.	sangat rendah.	D. I.	m: 1 1
4	Rezky	Efektifitas	Hasil Penelitian:	Relavansi	Tidak
	Susanti	pendampi	tentang	penelitian ini	adanya
	(2015)	ngan Desa	pendampingan	dengan	kelanjutan
		dan	Desa dan	penelitian	tentang
		pertisipasi	partisipasi	penusis sama-	Efektifitas .
		masyarak	masyarakat	sama lebih	pendampi
		at dalam	dalam	mengfokuskan	ngan Desa
		pembangu	pembangunan	pada efektifitas	dan
		nan	infastruktur	yang dimana dalam	pertisipasi
		infrastrukt	perdesaan di		masyaraka
		ur	Desa sekodi ini	efektifikas	t dalam
		perdesaan	dirasa kurang	pendamping	pembangu
		di Dana Calan	efektif, hal ini	Desa memiliki	nan
		DesaSeko	karena	stategi dalam	infrastrukt
		dikecamat	pengetahuan	percepatan	ur
		an Dangalia	masyarakat yang	pembangunan.	perdesaan.
		Bengalis	masih kurag tahu		
		Kabupate	tentang		
		n Danakalia	keberadaan		
		Bengkalis	pendamping Desa		
			dan partisipasi		
			masyarakat yang		

		kurang aktif		
Perestroik	Peran	,	Relavanci	Tidak
				dijelaskan
	_	J	-	ya secara
	_		_	mendetail
(2010)	_		*	
		0,00100111	1	Peran
	_			Tenaga
	_	**	*	Pendampi
		1 0	U 1	ng Desa
				MenurutU
	2016			ndang-
	tentang	1 0	nulisadalahsam	undang
	Desa	Desa, dan	a-	No 6
	Dengan	mengkaji pada	samamempuny	Tahun
	Upaya	hambatan dan	ai pembahasan	2016
	Optimalis	upaya apa yang	pada	tentang
	as	dilakukan	tenagapendam	Desa
	Pembangu	pendamping Desa	pinDesa	Dengan
	nan Desa	dalam	A. D.	Upaya
	1.47/20	mengoptimalisasi	malkanpembag	Optimalisa
		kan	unan Desa.	S
		pembangunna		Pembangu Pembangu
		Desa berdasarkan		nan Desa.
		The state of the s		
	Perestroik aNaek Pakkat (2016)	aNaek Pakkat Pakkat Pendampi ng Desa MenurutU ndang- undang No 6 Tahun 2016 tentang Desa Dengan Upaya Optimalis as Pembangu	aNaek Pakkat Pakkat (2016) Tenaga Pendampi ng Desa MenurutU ndang- undang No 6 Tahun 2016 Desa Desa pembangunan Desa, serta rekrutmen tenaga tentang Desa Desa, dan Dengan Upaya Optimalis as Upaya nan Desa Desa Desa Desa Dembangun Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa	Perestroik aNaek Tenaga Pakkat Pakkat Pendampi ng Desa MenurutU ndang- undang No 6 Tahun 2016 Tentang Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa

B. Kajian Teori

1. Konsep Desa

a. Pengertian Desa

Kartohadikoesoemo (dalam Soimin, 2019:13) Desa adalah kesatuan masyarakat berdasarkan hukum adat dan hukum adat yang bertempat tinggal di wilayah dengan batas-batas tertentu.Karena keturunan dan kesamaan manfaat ekonomi, sosial dan budaya, keamanan dan kepemilikan, terdapat fisik dan mental yang sangat kuat. hubungan di antara mereka Seorang anggota dewan yang memiliki aset tertentu dan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan keluarga.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut (Naskah Akademik RUU Tentang Desa, 2007).Berdasarkan sejarah pertumbuhan Desa di Indonesia ada tiga tipe Desa yang sejak awal pertumbuhannya sampai sekarang diantaranya:

1) Desa adat (self-governing community).

Desa adat merupakan bentuk paling awal dan tertua di Indonesia. Konsep "otonomi primitif" mengacu pada makna desa adat ini. Desa adat menggunakan aset yang dimilikinya untuk mengelola dan mengelola diri sendiri, bebas dari campur tangan negara. Desa Adat tidak melaksanakan tugas administratif yang ditentukan oleh negara. Contoh desa adat di Pakraman, Bali.

2) Desa Adminstrasi (local state government).

Desa merupakan satuan wilayah administratif dan satuan pemerintahan terendah yang memberikan pelayanan administratif kepada pemerintah pusat. Desa administratif dibentuk oleh negara, merupakan perpanjangan tangan negara, dan dapat melaksanakan tugas-tugas administratif yang diberikan oleh negara. Desa administratif pada dasarnya tidak memiliki otonomi dan seringkali tidak demokratis.

3) Desa otonom (local-self government).

Artinya, desa didirikan berdasarkan asas desentralisasi hukum.

Desa otonom memiliki kekuasaan yang jelas karena konstitusinya menetapkannya. Oleh karena itu, desa otonom memiliki kewenangan yang cukup untuk mengurus dan mengurus keluarganya sendiri.

2. Konsep Strategi

a. Defenisi Strategi

Dari segi strategi, kata "strategi" berasal dari bahasa Yunani strategy atau stroke turkey, dengan strategi jamak. Kata "strategi" sendiri bersifat memerintah, atau diambil oleh para jenderal ketika merumuskan rencana untuk memenangkan perang. Tindakan (Salusu, 2006). Melalui penggunaan metode yang efektif berdasarkan sarana yang ada, penggunaan istilah "Strategos" dapat diartikan sebagai perencanaan dan pemusnahan musuh. Brecker (dalam Heene dkk, 2010).

Definisi pertama dari strategi yang dikemukakan oleh Jauch & Glueck (dalam Akdon, 2011) menunjukkan bahwa strategi adalah rencana yang terpadu, komprehensif dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi organisasi dengan tantangan lingkungan, dan bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan utama organisasi dapat dicapai melalui organisasi Menerapkannya dengan

benar untuk mencapainya. Kemudian ada strategi yang dikemukakan oleh (Salusu, 2006), yaitu seni menggunakan keterampilan dan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuannya dengan membangun hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Setiap eksekutif, manajer, orang yang bertanggung jawab atau ketua, direktur, pejabat senior, pejabat tingkat tinggi, dan pejabat tingkat rendah harus memahami hal ini. Ini harus ada karena strategi dijalankan oleh semua orang di setiap level.

Menurut Chandler (dalam Salusu 2015:64). Strategi adalah langkah-langkah yang diambil oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya, termasuk menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, menggunakan rangkaian operasi dan mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Jika diterapkan dengan benar, ketiga langkah dari strategi tersebut dapat mencapai efek terbesar. Hal ini dapat kita lihat dalam tiga langkah penerapan strategi, termasuk yang berikut ini:

1. Formulasi dan sasaran jangka panjang

Perumusan atau formasi tujuan jangka panjang merupakan upaya organisasi dalam perencanaan yang memperhatikan beberapa aspek penting antara lain identifikasi kondisi lingkungan dan ancaman serta peluang, penghitungan kekuatan dan kelemahan organisasi, serta penentuan tujuan dan nilai organisasi. Dan strategi

yang akan dicapai Persyaratan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2. Pemilihan tindakan

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi, selain perencanaan strategis yang matang juga sangat penting untuk menerapkan strategi tersebut, karena apabila strategi tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal maka akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan organisasi. Hasilnya akan didapat. Selain itu, menurut Hitt et al. (Dalam Salusu 2015: 167), dalam memilih tahapan tindakan harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia untuk mencapai misi utama organisasi.

3. Keterbatasan Sumber Daya

Sumber daya merupakan elemen yang sangat penting untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, apabila sumber daya tersebut tidak mencukupi maka akan sangat mempengaruhi kinerja yang akan diperoleh.

b. Tingkat-tingkat Strategi

Salusu (2006: 101) menjelaskan empat tingkatan strategi. Keseluruhan itu disebut strategi utama, yaitu: strategi wirausaha, strategi perusahaan, strategi bisnis dan strategi fungsional.

1) Enterprise Strategy

Strategi ini terkait dengan respon masyarakat. Setiap organisasi memiliki hubungan dengan komunitas. Masyarakat adalah kelompok di luar organisasi yang tidak dapat dikendalikan. Dalam masyarakat yang tidak terkontrol ini terdapat pemerintah dan berbagai kelompok lain, seperti kelompok penekan, kelompok politik, dan kelompok sosial lainnya. Oleh karena itu, strategi perusahaan akan difokuskan pada hubungan antara organisasi dan komunitas eksternal, sehingga dapat berinteraksi, sehingga dapat memberikan manfaat bagi organisasi. Strategi tersebut juga menunjukkan bahwa organisasi memang bekerja keras dan berusaha memberikan pelayanan yang baik untuk kebutuhan masyarakat.

2) Corporate Strategy

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga biasa disebut grand strategy, mencakup bidang-bidang yang terlibat dalam organisasi. Pertanyaan tentang apa bisnis atau urusan kita dan bagaimana kita mengendalikan bisnis tidak hanya dapat dijawab tidak hanya oleh organisasi komersial, tetapi juga oleh setiap organisasi pemerintah dan organisasi nirlaba. Apa tugas utama universitas? Apa misi dari yayasan, apa yayasannya, apa misi agensinya, dan apa agensinya? Organisasi ini, organisasi mana? Tunggu, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini sangat

penting, jika salah jawabannya akan berakibat fatal. Misal jika jawaban dari misi universitas adalah memasuki dunia bisnis maka konsekuensi menjadi orang kaya tersebut merugikan mahasiswa, pemerintah, negara, dan negara.Bagaimana menjalankan misi ini juga sangat penting. Ini membutuhkan keputusan strategis dan rencana strategis yang harus disiapkan setiap organisasi.

3) Business Strategy

Strategi di tingkat ini menggambarkan bagaimana merebut pasar sosial dan bagaimana menempatkan organisasi sebagai inti dari para penguasa, pengusaha, donor, dll. Semua ini untuk mendukung pengembangan organisasi yang lebih baik sekaligus mendapatkan keuntungan strategis.

4) Functional Strategy

Strategi ini merupakan strategi pendukung yang dapat mendukung keberhasilan strategi lainnya. Ada tiga jenis strategi fungsional yaitu:

a) Strategi fungsi ekonomi, termasuk fungsi yang memungkinkan organisasi bertahan sebagai sektor ekonomi yang sehat, termasuk fungsi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran, sumber daya, penelitian dan pengembangan.

- b) Strategi manajemen fungsional, meliputi fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, implementasi, pengendalian, kepegawaian, kepemimpinan, motivasi, komunikasi, pengambilan keputusan, representasi dan integrasi.
- strategis, fungsi c) Strategi masalah utamanya adalah mengendalikan lingkungan, termasuk kondisi lingkungan yang diketahui, serta kondisi yang tidak diketahui atau sering berubah. Tingkatan dari strategi ini adalah bersatu dan padu, dan mengirimkan sinyal kepada setiap pengambil keputusan puncak bahwa manajemen organisasi hendaknya tidak hanya dilihat dari perspektif kebersihan administrasi, tetapi kesehatan organisasi harus dipertimbangkan dari segi ekonomi. perspektif.

c. Tipe-Tipe Strategi

Setiap organisasi pasti memiliki strategi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Berbagai jenis strategi digunakan dalam organisasi. Beberapa strategi digunakan dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Kooten (dalam Salusu 2006: 104-105), jenis strategi tersebut antara lain:

1) Corporate Strategy (Strategi Organisasi)

Strategi tersebut terkait dengan perumusan tugas, sasaran, nilai, dan rencana strategis baru. Pembatasan diperlukan, yaitu pembatasan apa yang harus dilakukan dan untuk siapa.

2) Program strategy (Strategi Program)

Strategi ini lebih memperhatikan implikasi strategis dari program tertentu. Apa dampaknya jika suatu program diluncurkan atau diperkenalkan (dampak pada tujuan organisasi).

3) Resource Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya)

Fokus strategi sumber daya ini adalah memaksimalkan sumber daya dasar yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi, dapat berupa tenaga kerja, keuangan, teknologi, dll.

4) Institusional Strategy (Strategi Kelembagaan)

Fokus strategi organisasi adalah untuk mengembangkan kemampuan organisasi dalam melaksanakan rencana strategis Jenis strategi yang berkaitan dengan penelitian ini adalah strategi perencanaan, karena strategi perencanaan mengutamakan dampak dari kegiatan yang diperkenalkan dan dilaksanakan. Strategi program mengutamakan manfaat dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, strategi organisasi meliputi bagaimana mulai memperkenalkan rencananya kepada publik dalam bentuk sosialisasi sehingga publik dapat memahami dan

memahami reputasi organisasi sehingga dapat lebih memahami dan berpartisipasi. Setiap aktivitas dilakukan oleh organisasi.

d. Strategi Pembangunan Desa

Adisasmita (2013:76) Mengatakan Pengembangan masyarakat perdesaan merupakan bagian dari community development yang ditujukan untuk pengembangan kelembagaan dan peran serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan unit-unit di perdesaan. Setiap negara menerapkan strategi pembangunan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, terutama dalam hal pertumbuhan penduduk, kemiskinan, urbanisasi dan pengangguran masyarakat.

Untuk mencapai tujuan pembangunan pedesaan menurut
Adissas Mita (2013: 76) terdapat empat jenis strategi yaitu:

1) Strategi Pertumbuhan (*The Growth Strategy*)

Strategi pertumbuhan bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai ekonomi yang pesat dengan meningkatkan pendapatan penduduk, produktivitas sektor pertanian, permodalan, kesempatan kerja, dan meningkatkan daya konsumsi masyarakat pedesaan.

2) Strategi Kesejahteraan (*The Welfare Strategy*)

Tujuan dasar dari strategi kesejahteraan adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan penduduk pedesaan melalui pelayanan dan penguatan rencana pembangunan sosial skala besar atau nasional.

3) Strategi Tanggap Terhadap Kebutuhan Masyarakat (*The Responsive Strategy*)

Strategi ini merupakan respon terhadap strategi kesejahteraan, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri masyarakat (swasembada dan pendampingan) dengan bantuan pihak luar untuk memajukan usaha mandiri di desa dengan menyediakan teknologi dan menyediakan sumber daya yang sesuai

4) Strategi Terpadu Menyeluruh (The Integrated Or Holistic

Strategy)

Strategi komprehensif dan komprehensif ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang terkait dengan kelangsungan pertumbuhan, pemerataan, kesejahteraan dan masyarakat sekaligus berperan aktif dalam proses pembangunan pedesaan.

Hal ini dapat dilihat dari penjelasan strategi pembangunan perdesaan bahwa tujuan dari strategi pembangunan perdesaan adalah untuk mewujudkan kemandirian desa, kesinambungan pertumbuhan dan tujuan kesejahteraan masyarakat.

3. Konsep Pendamping Lokal Desa

a. Pengertian Pendamping Lokal Desa

Menurut Mayeroff (dalam Erviyati, 2013: 16), kata "pengiring" digunakan untuk menterjemahkan kata "carring". Kata tersebut berasal dari kata "caring" dan berarti "caring", "nurturing" atau "caring".

Namun, sejak tahun 1983, kata carring telah diterjemahkan menjadi kata "pengiring". Menurut Esrom Arisitonang dan lainnya, kata "tuntunan" berasal dari kata "redaman". Orang yang melakukan kegiatan mentoring sering disebut sebagai "partner". Oleh karena itu pendamping akan memberikan bantuan dalam arti, pendamping akan mendampingi atau menjadi partner dalam masyarakat.

Mendampingi adalah kegiatan yang berkelanjutan, yang dapat berarti pembinaan, pengajaran, dan pengarahan dalam kelompok yang memiliki arti menguasai, mengendalikan, dan mengendalikan. Kata pengiring disatukan kembali, disejajarkan, dikesampingkan, dan lebih bermakna bila berada di samping, sehingga posisi antara keduanya (pendamping dan pembantu) sama, sehingga tidak ada dikotomi antara superior dan inferior. Artinya peran peer sebatas memberikan alternatif, nasehat dan pendampingan pendampingan, bukan dalam pengambilan keputusan (Adisasmita, 2013).

b. Fungsi Pendamping Desa dalam Pembangunan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa pada pasal 12, Tupoksi dari Pendamping Lokal Desa yaitu:

 Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- Sebagai tenaga ahli, pendampingan dalam peningkatan penyelengaraan pemerintahan Desa harus dilaksanakan agar pembangunan Desa serta kemajuan Desa dapat terwujud.
- 3) Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 4) Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 5) Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa. Pendampingan Desa sangat berpengaruh dalam pendampingan kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat. Kelompok-kelompok yang ada harus diorganisasi agar dapat berkembang dan dapat memajukan Desa.
- 6) Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru. Peningkatan sumber daya manusia merupakan hal penting untuk terwujudnya pembangunan Desa yang partisipatif, oleh karena itu pendamping Desa harus mampu untuk meningkatkan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat.

- 7) Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif. Tidak hanya pendampingan kepada aparatur Desa, pendampingan Desa juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan yang berwawasan lingkungan. Karena pembangunan Desa dapat terwujudjika dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh aparatur Desa dan seluruh masyarakat.
- 8) Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 9) Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antar sektor agar pembangunan Desa dapat terwujud dalam pelaksanaannya tidak hanya melibatkan satu sektor namun harus ada beberapa sektor baik dari sektor ekonomi maupun sektor keamanan nasional.
- 10) Mengoptimalkan aset lokal Desa secara amansipatoris. Aset lokal Desa dalam penunjang pembangunan Desa harus digunakan dengan optimal dan bijak. Oleh karena itu optimalisasi aset lokal Desa oleh pendamping Desa diperlukan untuk penunjang pembangunan Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tugas Pendamping Desa dapat dimaknai bahwa, pendampingan terhadap Desa pada prinsipnya adalah upaya untuk menggerakkan potensi yang ada di Desa sehingga Desa mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk perubahan-perubahan ke arah lebih baik dari sisi ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Karna itu pendampingan Desa tidak bisa hanya dilihat dan dimaknai sebagai aktivitas membantu Desa menjalankan aspek-aspek teknokratis dan administratif saja. Lebih dari itu, pendampingan Desa merupakan aktivitas mengubah nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa agar bisa diterjemahkan dalam perilaku keseharian di Desa.Dari tugas pendamping lokal Desa yang Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

c. Peraturan Tentang Pendamping Desa

Peraturan tentang pendampingan Desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Dan berdasarkan Peraturan Menter Desa Nomor 3 Tahun 2015, pendampingan Desa merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melakukan tindakan pemberdayaan kepada masyarakat melalui asistensi, pengkordinasian, pengarahan dan fasilitasi Desa. Pendampingan Desa dilaksanakan oleh Pendamping Lokal Desa. Pendamping Lokal Desa bertugas

mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Perbedaan mendasar model pendampingan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah ada tuntutan terhadap para pendamping Desa untuk mampu melakukan transformasi sosial dengan mengubah secara mendasar pendekatan kontrol dan mobilisasi pemerintah terhadap Desa menjadi pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Masyarakat Desa dan pemerintah Desa sebagai satu kesatuan self governing community diberdayakan untuk mampu hadir sebagai komunitas mandiri. Dengan demikian, Desa didorong menjadi subyek penggerak pembangunan Indonesia dari pinggiran, sehingga mampu merealisasikan salah satu agenda strategis prioritas pemerintahan yaitu "Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan".

4. Konsep Pembangunan

a. Definisi pembangunan

Secara umum, pembangunan diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan warga negara, biasanya kemajuan terutama mengacu pada kemajuan materi. Oleh karena itu, pembangunan biasanya dimaknai sebagai kemajuan yang dicapai masyarakat di bidang ekonomi. Bahkan dalam beberapa situasi yang

sangat umum, pembangunan diartikan sebagai bentuk kehidupan, yang tidak diinginkan oleh "orang-orang yang terpinggirkan", dan ideologi politik yang memberikan legitimasi kepada pemerintah yang berkuasa untuk membatasi kritiknya. (Arief Budiman, 2000).

Secara teoritis, Portes, menurut deddy T.Tikson (2005:11) pembangunan Desameliputi empat aspek uatam yaitu :

- 1. Pembangunan desa dari segi alam yaitu tujuan utamanya adalah pembangunan alam (sarana, prasarana dan masyarakat) di pedesaan, seperti jalan pedesaan, pembangunan rumah, permukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan (Perangkat Keras (berupa sarana dan prasarana), berbagai bentuk peraturan, kursus dan metode pembelajaran dalam bentuk pendidikan dan perangkat lunak), olahraga, dll..
- 2. Pembangunan nonmateri, yaitu tujuan utamanya untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas, keterampilan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan sebagai warga negara, seperti pendidikan dan pelatihan, ekonomi, pertanian, kesehatan, pembinaan spiritual, dll.
- 3. Dari segi pembangunan ekonomi, pembangunan berkelanjutan sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, dan bagaimana menemukan pembangunan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kontemporer tanpa

mengurangi keterjangkauan alam, sosial dan ekonomi.

Meningkatkan kesejahteraan generasi penerus. Karenanya, jika generasi pertama bisa maju, masyarakat bisa mencapai kemakmuran.

4. Perkembangan masyarakat berarti dipengaruhi oleh manusia sebagai pendukung komunitas dalam hal interaksi, keterkaitan dan kesaling tergantungan. Perhatian sosial utama adalah stabilitas populasi, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, menjaga keragaman budaya, dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan.

b. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan meliputi pembangunan berwujud dan tidak berwujud. Pembangunan fisik mengacu pada pembangunan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, atau pembangunan yang dapat dilihat dengan mata telanjang, seperti berupa prasarana, gedung, dan fasilitas umum. Sedangkan pembangunan nonmateri adalah pembangunan yang diciptakan atas dorongan masyarakat setempat, dan waktu pembangunannya lama.Contoh pembangunan nonmateri adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan meningkatkan kesehatan masyarakat. (Kuncoro, 2010).

Pembangunan perdesaan merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional, yaitu upaya peningkatan sumber daya

manusia perdesaan dan kualitas seluruh masyarakat secara berkelanjutan berdasarkan potensi dan kapasitas desa. Dalam penyelenggaraan pembangunan perdesaan perlu diperhatikan perwujudan tujuan pembangunan, yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan. (Adisasmita, 2006: 3).

Hakikat pembangunan pedesaan dilakukan bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah terutama dalam hal pembinaan, pembinaan, pembinaan dan pengawasan, sehingga kapasitas masyarakat dapat ditingkatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan (Kartasasmita, 2001).

Berdasarkan definisi pembangunan perdesaan di atas, dapat dijelaskan bahwa pembangunan perdesaan adalah suatu konsep pembangunan yang berbasis pedesaan dengan tetap memperhatikan ciri-ciri sosial budaya penduduk perdesaan. Pembangunan pedesaan diharapkan menjadi solusi bagi perubahan sosial masyarakat pedesaan dan menjadikan perdesaan sebagai basis perubahan.

c. Tujuan Pembangunan Desa

Tujuan pembangunan pedesaan terbagi menjadi dua, yaitu pembangunan pedesaan jangka panjang dan pembangunan pedesaan jangka pendek. Tujuan jangka panjang desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dicapai dengan

peningkatan kesempatan kerja, peluang usaha dan pendapatan yang berbasis pembangunan lingkungan, pengembangan usaha dan pembangunan manusia. Secara tidak langsung adalah meletakkan dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Sedangkan tujuan pembangunan jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam (Adisasmita, 2006).

Dari pengertian pembangunan pedesaan dapat dipahami bahwa tujuan pembangunan pedesaan adalah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat. Pembangunan perdesaan dilakukan dalam rangka intervensi untuk mengurangi tingkat kesenjangan kemajuan perkotaan-perdesaan yang diakibatkan oleh pembangunan ekonomi.

d. Prinsip dasar perencanaan dalam pembangunan Desa

Pembangunan Desa sejauh ini tak memperlihatkan hasil signifikan karena tak jelas darimana sumber perjuangannya. Dengan tegas, UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa perencanaan pembangunan Desadi dusun secara berjangka meliputi:

 Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM Des)untuk jangka 6 tahun, dan Rencana pembangunan tahun Desa (RPTD) atau yang disebut rencana kerja pemerinta Desa (RKP Des) merupakan penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada beberapa prinsip dasar dalam perencanaa yang telah ditegaskan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.Prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan Desa itu di antaranya:

- Ditegaskan dalam UU Desa bahwa perencanaan pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa. Karenanya, program pemerintah da pemerintah daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan didelegasikan perencanaanya kepada Desa.
- 2. UU Desa juga menegaskan bahwa Desa adalah subjek pembangunan yang mandiri, tidak boleh diimposisi tetapi justru harus diperkuat oleh supraDesa (Kabupaten/Kota).
- 3. UU Desa telah menegaskan bahwa penyususnan perencanaan pembangunan Desa harus partisipatif dengan melibatkan banyak aktor di Desa, dan dilakukan dengan jalan *deliberasi* melalui satu forum musrenbang Desa yang demokratis.
- 4. Agar pembangunan tepat sasaran dan tepat anggaran, dan kebutuhan pembangunan Desa harus dirumuskan berdasarkan

penelitian kebutuhan (*need assessment*) yang ditetapkan melalui musrenbang Desa.

e. Arah kebijakan dan strategi pembangunan Desa

Soimin(2019:51) arah kebijakan dan strategi pembangunan Desa, meliputi:

 Pemenuhan standar pelayanan minimum Desa sesuai dengan kondisi geografisnya.

Menyususn dan memastikan terlaksanannya NSPK SPM Desa (antara lain perumahan, permukiman, pendidikan, kesehatan, perhubungan antar permukiman ke pusat layanan pendidikan, pusat layanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi, pengairan, listrik dan telekomunikasi).

- Penanggulan kemiskinan dan pembangunan usaha ekonomi masyarakat Desa.
 - a) Penataan dan penguatan BUMDesa untuk mendukung kesediaan prasaranaproduksi khususnya benih, pupuk pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga Desa.
 - b) Fasilitasi, pembinaan, pendampingan dalam pembangunan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan.

- c) Menigkatkan kepastian masyarakat Desadalam pemanfaatan dan pembangunan teknologi tepat guna perdesaan.
- Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa.
 - a) Mengembangkan pendidikan berbasis keterampilan dar kewirausahaan.
 - b) Mendorong peran aktif masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan.
 - c) Mengembangkan kapasitas dan pendampingan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat secara berkelanjutan.
 - d) Menguatkan partisipasi masyarakat dengan pengarusutamaan gender termasuk anak, pemuda, lansia, dan penyangang disabilitas dalam pembangunan Desa.
 - e) Menguatkan kapasitas masyarakat Desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup Desa termasuk Desa pesisir secara berkelanjutan.
 - f) Meninngkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat Desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik.
 - g) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan pembangunan Desa.

h) Meningkatkan pertisipasi dan kepastian tenaga kerja (TKI/TKW) di Desa.

C. Kerangka Berpikir

Sebagaimana diketahui Stainer dan Miner sebagaimana diterjemahkan oleh Ticoalu dan Agus Dharma (2005), definisi strategi berasal dari kata Yunani strategos yang artinya umum. Secara khusus, strategi adalah "pemalsuan" dari misi perusahaan atau organisasi. Ini menetapkan tujuan organisasi dengan menahan kekuatan eksternal dan internal, merumuskan strategi dan strategi tertentu untuk mencapai tujuan dan memastikan implementasi yang benar, sehingga membuat tujuan utama organisasi dan tujuan yang dicapai. Akan terwujud.

Strategi juga didefinisikan sebagai pusat tipikal dan inti dari manajemen strategis. Strategi mengacu pada perumusan tugas, tujuan, dan sasaran organisasi; strategi dan rencana kebijakan utama untuk mencapai tujuan tersebut; dan metode yang diperlukan untuk memastikan implementasi strategi untuk mencapai tujuan akhir organisasi.

Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir

Aspek strategi pembangunan Desa (Salusu 2015:64)

- 1. Formulasi dan sasaran jangka panjang
 - a. Identifikasi ancaman dan peluang
 - b. Identifikasi nilai dan tujuan
- 2. Pemilihan tindakan
 - a. Perencanaan
 - b. Pelaksanaan
- 3. Keterbatasan Sumber daya
 - a. Capaian kinerja

Faktor penghambat strategi pendamping lokal Desa dalam percepatan pembangunan Desa (Deddy T.Tikson 2005:11)

- 1. Pembangunan aspek fisik
 - a. Sarana prasarana
 - b. Manusia
- 2. Pembangunan aspek non fisik
 - a. Peningkatan kemampuan/s kill
- 3. Pembangunan aspek ekonomi
 - a. Kesejahteran Ekonomi
 - 4. Pembangunan aspek sosial
 - a. Pendukung komunitas

1. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

a. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasan terhadap masalah-masalah variabel yang di jadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoprasikannya di lapangan. Adapun batas pngertian konseptual pembahasan ini adalah :

1) Strategi

Menurut Chandler (dalam Salusu 2015: 64). Strategi adalah langkah-langkah yang diambil oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya, termasuk menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, menggunakan rangkaian operasi dan mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Jika diterapkan dengan benar, menerapkan tiga langkah dari strategi tersebut dapat mencapai efek terbesar. Hal ini dapat kita lihat dalam tiga langkah penerapan strategi, antara lain sebagai berikut: 1) Perumusan dan tujuan jangka panjang merupakan upaya yang dilakukan organisasi dalam perencanaan

yang memperhatikan beberapa aspek penting antara lain identifikasi kondisi lingkungan dan ancaman dan peluang, perhitungan kekuatan dan kelemahan organisasi, penetapan tujuan organisasi. dan nilai-nilai yang ingin dicapai, Dan secara efektif dapat menegakkan ketentuan strategi. 2) Memilih tindakan untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, selain perlu adanya perencanaan strategis yang matang juga sangat penting yaitu pada saat melaksanakannya, karena apabila strategi tersebut tidak dapat dilaksanakan maka akan sangat mempengaruhi hasil yang akan diperoleh. Selain itu, menurut Hitt dkk. (Dalam Salusu 2015: 167), pada tahap seleksi tindakan harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai misi utama organisasi. 3) Sumber daya yang terbatas Sumber daya merupakan elemen yang sangat penting untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. Jika sumber daya tersebut tidak mencukupi maka akan sangat mempengaruhi kinerja yang akan diperoleh.

2. Pembangunan Desa

Secara teoritis, Portes, menurut Deddy T.Tikson (2005:11)

Pembangunan desa meliputi empat aspek pokok, yaitu: 1)

Pembangunan fisik desa, yaitu pembangunan fisik desa yang objek utamanya adalah pembangunan aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) di pedesaan, seperti jalan desa, pembangunan rumah,

permukiman, jembatan, Bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan (perangkat keras berupa sarana dan prasarana pendidikan serta perangkat lunak dalam bentuk berbagai peraturan, kursus dan metode pembelajaran), olah raga, dll. 2) Pembangunan nonmateri, maksudnya untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas, keterampilan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan sebagai warga negara, seperti pendidikan dan pelatihan, ekonomi, kerohanian, dll. 3) Dalam pertanian, kesehatan, pembangunan ekonomi, pembangunan berkelanjutan sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, bagaimana menemukan cara untuk mengembangkan ekonomi dalam jangka panjang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kontemporer mengurangi kemampuan alam, sosial dan ekonomi. Meningkatkan kesejahteraan generasi penerus. Karenanya, jika generasi pertama maju, masyarakat bisa mencapai kemakmuran. Perkembangan artinya dipengaruhi sosial, manusia masyarakat pendukungnya dalam hal interaksi, keterkaitan dan kesalingtergantungan. Perhatian sosial utama adalah stabilitas populasi, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, keragaman budaya, dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberi kita informasi tentang bagaimana mengukur variabel. Definisi operasional memberi kita petunjuk tentang bagaimana mengukur variabel. Definisi operasional adalah informasi ilmiah dan sangat berguna bagi peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama untuk penelitian. Karena berdasarkan informasi tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana mengukur variabel yang dibangun di atas konsep yang sama. Oleh karena itu, kami dapat menentukan apakah akan terus menggunakan prosedur pengukuran yang sama atau membutuhkan pengukuran baru.

1) Aspek strategi pembangunan Desa

- 1. Formulasi sasaran jangka panjang
 - a. Identifikasi ancaman dan peluang
 - b. Identifikasi nilai dan tujuan
- 2. Pemilihan tindakan
 - a. Perencanaan
 - b. Pelaksanaan
- Keterbatasan Sumber daya
 - a. Capaian kinerja

2) Faktor penghambat strategi pendamping lokal Desa dalam percepatan pembangunan Desa

- 1. Pembangunan aspek fisik
 - a. Sarana prasarana

- b. Manusia
- 2. Pembangunan aspek non fisik
 - a. Peningkatan kemampuan/skill
 - b. Pemberdayaan masyarakat
- 3. Pembangunan aspek ekonomi
 - a. Kesejahteran
 - b. Ekonomi
- 4. Pembangunan aspek sosial
 - a. Pendukung komunitas

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan bertujuan untuk mengungkap data dan fakta yang dikumpulkan dalam teks atau gambar daripada dalam bentuk digital. Dan menggambarkan situasi Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Tujuan lain dari penelitian ini adalah searah dengan rumusan masalah.

Peneliti akan terjun langsung ke tempat yang dijadikan objek penelitian, sebagai peneliti akan secara langsung mengamati berbagai bentuk strategi pendampingan desa (PLD) untuk memajukan pembangunan pedesaan.

B. Lokasi

Adapun subyek penelitian ini adalah Pendamping Lokal Desa yang ada di Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

Alasan dilakukannya penelitian di lokasi ini adalah untuk mengetahui:

- Perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- Pelaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana Desa.

Peningkatan kapasitas bagi pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan
 Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang akan diteliti. Dalam hal ini, data primer yang diperoleh dari deskriptif tentang Strategi pendamping lokal Desa (PLD) dalam percepatan pembangunan Desa bersumber dari Aparatur Desa, dan di Kec. Sape Kab. Bima 2019.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dala arsip (data documenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data primer dalam penelitian ini didapat melalui dokumentasi dan observasi mengenai Strategi pendamping lokal Desa (PLD) dalam percepatan pembangunan Desa di Kec. Sape Kab. Bima 2019.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu kegiatan penelitian, tidak semua peneliti dapat menyeleksi data yang berkaitan dengan topik penelitiannya, berdiskusi, menganalisis, dan kemudian menarik kesimpulan. Salah satu tahapan penting dalam penelitian adalah mencari data. Berikut ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:

1) Observasi

Jenis observasi yang gunakan oleh peneliti adalah observasi terus terang atau tersamar, dimana peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian di Kecamatan Sape.

Jadi, Strategi pendamping lokal Desa (PLD) dalam percepatan pembangunan Desaini akan mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau samar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang akan dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan jikalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diizinkan untuk melakukan observasi.

2) Wawancara/Interview

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semiterstruktur atau *Isemistructure interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan idenya. Dalam melakukan wawancara ini, peneliti harus mendengarkan dengan seksama dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seorang. Dalam metode ini, peneliti mengumpulkan data yang berupa arsip, dan tulisan yang berStrategi dengan permasalah penelitian. Adapun data yang di dapatkan peneliti yakni berupa Buku, Arsip Data Desa, Profile Desa, dan Foto Dokumentasi, serta gambar-gambar yang perlu penulis dapatkan selama melakukan penelitian.

E. Teknik Pengembilan Narasumber

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel, mengggunakan teknik *purposive sampling*, teknik ini dipilih berdasarkan pertimbangan yaitu peneliti mempertimbangkan informaninforman yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Adapun informan-informan diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Daftar Narasumber Penelitian

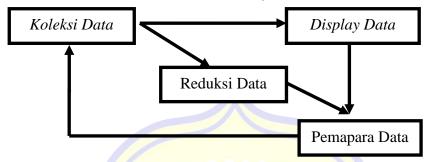
No	Narasumber
1.	Pendamping Lokal Desa
2.	Pendamping Desa

F. Teknik Analisis Data

Menurut penelitian kualitatif Sugiyono, Susan Stainback menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian data yang diperoleh secara sistematis dari wawancara, observasi, dan dokumen. Caranya adalah dengan mengolahnya menurut kategori, mendeskripsikannya sebagai unit, mengintegrasikannya, dan memilihnya dengan cara mode. Yang penting, konten yang akan dipelajari dan kesimpulan yang diambil agar mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Selanjutnya, model interaktif dalam analisis data berdasarkan Miles dan Huberman ditujukan pada gambar berikut ini:

Gambar 3. 1 Model Interaktif Miles dan Huberman



a) Koleksi Data

Menurut Sugiyono koleksi data merupakan tahap awal dalam proses menganalisis data dan ini dilakukan setelah melakukan penelitian. Pada tahap ini dimana peneliti akan mengumpulkan semua hasil penelitian seperti data-data yang peneliti dapat dari lapangan tanpa terkecuali, baik itu hasil observasi, hasil wawancara, maupun dokumentasi akan peneliti koleksikan semuanya pada tempat yang satu. Serta pada tahap inilah peneliti akan menjaga keutuhan serta kelengkapan data yang telah didapatkan.

b) Data Reduction (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono redusi data berarti merangkum, memilih pokokpokok dalam penelitian, fokus pada hal-hal yang bersifat penting dan pola tertentu sehingga memiliki makna.

c) Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan penyajian setelah data reduksi, dimana penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie chard dan sebagainya.Melalui penyajian data ini, maka data akan terorganisasikan, tersusundalam pola Strategi, sehingga akan mudah difahami oleh peneliti maupun orang lain.

d) Conclusion Drawing/Verification

Pada penelitian yang bersifat kualitatif kesimpulannya masih bersifat sementara. Kesimpulan hasil penelitian dapat menjawab rumusan masalah yang ada sudah dirumuskan sebelumnya. Selain dari memberikan jawaban atas rumusan masalah yang ada sebelumnya, kesimpulan dapat memberikan temuan yang berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga diteliti menjadi jelas, dan dapat berupa strategi kausal atau interaktif, hipotesis maupun teori.